



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

NASIONALISME, WAWASAN KEBANGSAAN DAN INTEGRASI BANGSA DALAM PENGEMBANGAN PIPS

Sukamto

PIPS, FIS Universitas Negeri Malang

e-mail: sukamto.fis@um.ac.id

ABSTRAK

Wawasan Kebangsaan dapat diartikan dengan Nasionalisme sering disalingtukarkan dengan orientasi kebangsaan. Sasaran utama dalam Wawasan Kebangsaan tidak lain adalah tetap tegaknya eksistensi suatu negara bangsa atau nation (NKRI). Nation itu sendiri mengada setelah adanya keinginan untuk bersatu. Kini rasanya di antara elit masyarakat baik itu elit intelektual maupun elit kekuasaan telah terjebak kedalam arus *primordialisme* dan *sektarianisme*, dan tentunya hal ini sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa (keutuhan negara bangsa). Sehingga Wawasan Kebangsaanpun mengandung bahaya dan mengidap penyakit. Wawasan Kebangsaan bangsa Indonesia telah dan sedang mengalami pasang surut (akibat *primordialisme* dan *sektarianisme*), sehingga diperlukan terapi dan penanganan yang segera. Bahwa sejarah telah membuktikan betapa peran wawasan kebangsaan sangat penting bagi keutuhan negara bangsa. Karena itu menjadi tugas semua warga negara Indonesia untuk memikirkan upaya-upaya peningkatan dan pemupukan wawasan Kebangsaan, sekaligus mengurangi unsur negatifnya melalui berbagai sarana, apakah lembaga formal, pendidikan luar sekolah maupun media massa. PIPS, FIS menjadi bagian yang memikul tanggungjawab atas keutuhan bangsa. Bagi negara bangsa wawasan Kebangsaan mengatasi etnis, suku ras dan agama

Kata kunci: Nasionalisme, Wawasan kebangsaan, integrasi nasional, pendidikan IPS.

PENDAHULUAN

Wawasan Kebangsaan, atau Nasionalisme bolehjadi, merupakan salah satu problema nasional yang mendesak untuk ditangani. Mengapa demikian ?. Alasan pertama, pembangunan yang kita laksanakan sekarang pada merupakan era Kebudayaan Nasional yang kedua. Sebagai era baru perlu adanya penyegaran pikiran dan pandangan agar bisa memperoleh baru dan etos baru sesuai dengan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

tuntutan jaman. Penyegaran demikian berlaku pula bagi persoalan yang menyangkut wawasan Kebangsaan kita.

Yang kedua, dalam tahun 2016 memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-71. Suatu negara bangsa yang sudah berusia, 71 tahun sudah pada tempatnya kalau mampu menunjukkan kematangan atau kedewasaannya, tidak lagi kekanak-kanakan, tidak menunjukkan gejala pikun, pemikiran dan perilakunya tidak emosional, tidak cekak nalar, serta penuh pertimbangan dan kebijaksanaan sebagaimana layaknya orang dewasa. Lebih dari itu, suatu negara bangsa yang sudah menginjak usia sedemikian ini juga tidak pada tempatnya kalau masih egois, minta menang sendiri, atau dengan angkuhnya mengatakan “Akulah single majority”. Sebaliknya, dalam kondisi yang demikian itu tentunya akan selalu mencoba melakukan perenungan, refleksi, dan ngudo-ros dalam upaya menemukan hikmah yang cukup bermakna.

Alasan yang ketiga, menurut pengamatan sementara ini agaknya telah terjadi erosi kebangsaan. Celakanya, erosi tersebut justru diidap oleh kelompok elit masyarakat, baik itu elit kekuasaan maupun elit intelektual. Tanda-tanda akan adanya erosi, atau lunturnya wawasan kebangsaan sebenarnya sudah mulai muncul bersamaan dengan semaraknya primordialisme dan sektarianisme secara historis sudah diakui bahwa primordialisme dan sektarianisme tidak akan dihapus dan terhapus. Bahkan demi persatuan dan kesatuan bangsa hal semacam itu tetap dibenarkan adanya yang demikian ini semakin diperparah lagi oleh era globalisasi dan abad komunikasi di bawah dominasi negara-negara superpower. Melalui globalisasi negara-negara super power mencoba mengkapling globe (bola dunia) dan menempatkannya di bawah pengaruhnya. Secara demikian tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa globalisasi tidak sefilantropis sebagaimana yang diduga orang (Abdulgani, 1994). Oleh karena itu pula tak perlu heran kalau dalam konteks globalisasi negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia di dalamnya, tidak lebih sebagai pelengkap penderita bukan penderita dan bukan sebagai subjek, Namun, demikian kita tidak akan mungkin menolak atau menghalang-halangi. Paling tidak kita hanya bisa beradaptasi sambil memanfaatkan, aset dan akses yang bisa dipetik. Wawasan Kebangsaan tidak mungkin meniadakan kesadaran lokal maupun global. Wawasan kebangsaan warga masyarakat kita sekarang sangat boleh jadi memang sedang mengidap penyakit yang membutuhkan terapi secara cepat. Dan perbincangan yang berkembang dewasa ini tidak lebih dari sekadar pencarian alternatif diagnosisnya.

Bertolak dari permasalahan tersebut sudah sepantasnya kalau Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) ikut mengambil bagian, paling tidak mencoba mengantisipasi dan sekaligus mencari solusi penyembuhannya melalui program-program pendidikan yang ada di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) maupun Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Sebagaimana, dipaparkan Nu'man Sumantri yang melalui sarasehan ini mengharap agar PIPS berperan sebagai laboratorium demikian, hal tersebut sebenarnya juga sesuai dengan temuan Seminar Wawasan Kebangsaan pada tanggal 6-7 Juli 1993, bahwa upaya, untuk menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan bisa, dilakukan melalui pencerahan, desektarianisasi dan demokratisasi.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Dengan pencerahan dimaksudkan untuk mengembalikan acuan pandang warga bangsa kepada akal sehat, dan membersihkan kepentingan terselubung dari pelbagai kekuatan sosial yang terkotak-kotak dalam dogmanya masing-masing. Desektarianisasi dimaksudkan sebagai gerakan-gerakan yang merupakan hasil pencerahan dan berupaya menghapus perbedaan pandangan yang bersumber kepada asal-usul yang ditakdirkan dalam gerakan sektarian. Sedang demokratisasi adalah proses pelibatan warga bangsa secara aktif dalam kehidupan kenegaraan secara integratif dan suprasektarian.

Yang menjadi persoalan apakah kaitan fungsional antara wawasan kebangsaan dengan pengembangan PIPS memang merupakan masalah yang cukup krusial ?

Menurut penulis memang ada hal-hal yang perlu dilacak terlebih dahulu, mengapa harus dengan wawasan kebangsaan ? Untuk itu marilah kita telusuri perspektif historisnya, baik terhadap wawasan kebangsaan itu sendiri maupun pengembangan PIPSnya. Untuk bisa memperoleh jawaban yang memadai atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas ada baiknya kajian berikut lebih difokuskan kepada, upaya mengklasifikasikan jejak-jejak akar nasionalisme; persoalan patriotisme, nasionalisme dan internasionalisme (globalisasi); wawancara kebangsaan dalam konteksnya; dan pengaktualisasian wawasan kebangsaan dalam FIS di masa depan.

Pada dewasa ini, yang namanya krisis solidaritas nasional agaknya semakin menggejala, terutama pada kehidupan elit masyarakat, dan mengarah pada corak solidaritas sektarian, primordial yang sempit. Krisis solidaritas nasional semacam itulah yang oleh Ward (1982) dianggap sebagai kegagalan dari nasionalisme. Dengan begitu yakin Ward mengemukakan, bahwa kohesivitas yang menurut dugaan semula akan berkembang melalui nasionalisme, justru merupakan ancaman baru. Runtuhnya kekaisaran Romawi dan Rusia di masa yang lampau sementara pada latar masa kini setelah hancurnya Komunis Rusia telah menimbulkan peperangan di antara, negara-negara Serbia, Bosnia, Herzegovina, dan lain sebagainya.

Senada dengan pandangan Ward adalah Arnold Toynbee yang mengatakan bahwa Nasionalisme tidak lebih sebagai salah satu bentuk berhala modern (Smith, 1979). Sebab berbeda, dengan nasionalisme yang muncul di Timur, nasionalisme Di Barat melayani kerakusan dan ketamakan umat manusia. Di Amerika. serikat misalnya, nasionalisme mempunyai konotasi yang lebih negatif dibanding dengan patriotisme (Sargent, 1986:23).

Masalah pokok wawasan kebangsaan adalah kesadaran aktual secara kelompok atas adanya krisis solidaritas keindonesiaan Yang secara aktual menjurus ke arah desintegrasi kehidupan bangsa Indonesia. Namun begitu bagi bangsa Indonesia wawasan kebangsaan bukanlah masalah baru. Wawasan kebangsaan sudah ada sejak jaman dahulu, yang mengkristal pada Kongres Pemuda pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Akhir-akhir ini memang masalah Wawasan Kebangsaan menjadi perhatian para ahli yang sempat menyeruak ke permukaan dengan transparan naskah,



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

sehingga timbul diskusi-diskusi, seminar-seminar baik lokal, regional maupun nasional. Keprihatinan atas Wawasan Kebangsaan merupakan proses sejarah sendiri, bahkan di dalamnya terdapat dialektikanya sendiri, hal ini tidak dapat tidak harus dicari di dalam praksis bangsa Indonesia. Ini ditandai rapuhnya penghayatan, perilaku dan tindakan yang jauh dari nilai kebangsaan. Konglomerasi pada tingkat mondial menggerogoti eksistensi negara, nasional, begitu pula konglomerat nasional, menggerogoti kekayaan negara sebagaimana diungkapkan oleh Abdulgani (1994) merupakan contoh yang sangat mencemaskan juga.

Wawasan Kebangsaan kini bukan hanya penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam segala sektor kehidupan masyarakat. Tujuan akhir dari Wawasan Kebangsaan tidak lain adalah tetap tegaknya negara kebangsaan Indonesia yang kita cintai bersama ini. Walaupun wawasan kebangsaan tidak harus meniadakan keunikan atau kekhasan baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sebagaimana Abdurachman Wachid (1994) menyatakan bahwa mempertahankan unikum suatu golongan hanya dapat dikembangkan dalam kebersamaan dengan golongan-golongan lain. Hal itu pulalah yang harus diwujudkan dalam Wawasan Kebangsaan, sebagaimana Poespowardoyo, Mangun Wijaya dan semua peserta Seminar Wawasan Kebangsaan pada 6-7 Juli 1993 menghimbau dan mencanangkan sebuah gerakan kebangsaan baru baik untuk generasi tua maupun generasi muda. Ada tiga tawaran sasaran yang bersifat programatis yang diperkirakan mampu memberikan kontribusi dimasa depan adalah pencerahan, desektarianisasi dan demokratisasi.

Di antara, nasionalisme dan wawasan kebangsaan ada yang secara tegas membedakan, namun ada pula yang menggunakan secara bergantian, jadi di antara keduanya dapat saling dipertukarkan. Secara etimologis keduanya memang dapat kita bedakan, begitu pula berdasarkan pedalanan sejarah di antara keduanya. Nasionalisme baik yang tumbuh di daratan Eropa maupun yang tumbuh di daratan Asia dan Afrika memang tumbuh lebih kemudian. Jadi secara kronologis, Nasionalisme lebih dahulu berkembang di daratan Eropa dan kemudian menjangkar ke Asia maupun Afrika. Latar sejarahnya pun berbeda, nasionalisme Eropa disebabkan oleh paham liberalisme di bidang ekonomi, sedangkan nasionalisme Asia Afrika sebagai reaksi dari cengkeraman kapitalisme dan imperialisme serta kolonialisme sehingga bagaimana wujud kolonialisme sesudah kemerdekaan masih perlu diperjuangkan formulasinya.

Di Indonesia ditinjau dari cakupan substansi (materi) nasionalisme lebih didasarkan pada perlawanan terhadap kolonialisme, di mana masyarakat dalam situasi dan kondisi penjajahan. Walaupun nasionalisme juga mengenai kelompok etnis tertentu, namun isi cakupannya lebih sempit dan bahkan sederhana dibanding dengan wawasan kebangsaan yang baru muncul akhir-akhir ini, setelah dunia ini dilanda oleh proyek globalisasi dan era komunikasi yang tentunya industrialisasi termasuk didalamnya. Persoalan nasionalisme maupun wawasan kebangsaan bukanlah hanya penting akibat era industrialisasi, globalisasi maupun komunikasi, melainkan lebih jauh dari pada itu akibat merebaknya liberalisasi di segala aspeknya. Namun lebih khusus lagi dalam bidang perekonomian. Sayangnya sebagaimana disinyalir oleh Kweek Kian Gie (1994)



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

bahwa Nasionalismeyang berkembang kini sebenarnya masih berada pada pola nasionalismesebelum Kemerdekaan Negara, Republik Indonesia. APEC yang telah memutuskan untuk mulai perdagangan bebasnya di tahun 2020, merupakan suatu sinyalemen yang perlu diwaspadai demi kelangsungan hidup bermasyarakat maupun hidup bernegara. Sebab jelas, bahwa kehadiran pasarbebas yang akan diberlangsungkan itu merupakan tantangan yang cukupberat bagi Wawasan Kebangsaan atau Nasionalisme yang sedang direkonstruksi bentuknya, dirancang materi, sasaran dan metodenya. Sebabprogram Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang akan datang tidak mungkin disamakan dengan program pendidikan sebagaimana, tahun-tahun yanglalu yang banyak mengandung kelemahan dan kesalahan seperti percobaan atas diberlakukannya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Memang masih harus diberi catatan bahwa penanganan Wawasan kebangsaan bukan hanya menghadapi kendala, melainkan juga harus diperhitungkan keterjerumusan pada hal-hal yang ekstrem. Ekstremitas yang dimaksudkan bukan hanya ekstrim lokal tetapi juga ekstrim, mondial, seperti jinggonasionalisme dan juga chauvinisme.

MENCARI JEJAK AKAR NASIONALISME

Nasional adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata Inggris *nation*, semula dari perkataan latin *natio*, yang artinya kelahiran, suku, bangsa dan nasion yang berarti pula masyarakat yang sudah berkembang sedemikianrupa sehingga mempunyai kesamaan sejarah, tradisi, kebudayaan, bahasa dan biasanya ditambah satu hal lagi yaitu wilayah. Persamaan sejarah masakini tidaklah cukup; demikian pula ternyata. tradisi yang sama juga tidak memberikan jaminan; bahkan kebudayaan maupun wilayah dirasa pula kurang cukup; dari sini ternyata masih diperlukan adanya untuk bersatu menjadi syarat yang fundamental. Dengan demikian sejak dahulu timbul rasa kesadaran dan kesetiaan dalam anggota-anggota serta kemauan untuk hidup bersatu dalam negara yang merdeka, inilah yang biasanya dikenal sebagai kesadaran nasional. Seorang nasionalis adalah seorang pecinta.nusa dan bangsa. Nasionalisme yang demikian memang yang berkembang sebelum kemerdekaan.Namun bagaimana nasionalisme yang sebarusnya dipupuk usai kemerdekaan.Inilah yang perlu ditelusuri dan ditemukan. Kartodirdjo (1994) dalam, kaitannya dengan pendidikan menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang harus dipenuhi oleh nasionalisme yaitu (1) unity, (2) liberty, (3) equality, (4) kepribadian atau individualitas, serta (5) performance.

Di dalam negara Indonesia kaum nasionalis atau kaum kebangsaan merupakan golongan politik yang mempeduangkan negara, berdasarkan kebangsaan dengan tidak membedakan warga negara, menurut suku, ras, agama, dan kepercayaan yang dianut.Maka mengagungkansuku maupun ras serta agama dalam negara yang berlebihan dapat juga membahayakan wawasan kebangsaan itu sendiri, sehingga hal yang demikian perlu ditolak. Pada, sisi yang lain juga tidak diinginkan masalah globalisasi yang sampai menonjol melampui masalah nasionalisme atau wawasan kebangsaan.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Nasionalisme dapat disebut semacam etno-sentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebangsaan nasional, patriotisme dan sebagainya, terdapat pada, semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisasikan warga masyarakat yang senasib.

Kata nasionalisme mencakup dua arti: Pertama, dalam arti nasionalistis dimaksudkan suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Nasionalisme yang demikian sering disebut Jingo Nasionalism atau Chauvinism. Sikap kurang dewasa ini tidak menghargai orang dan bangsa, lain seperti semestinya. Apa, yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, hak, wajar atau *right or wrong my country*, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Jelas bahwa nasionalisme ini menceraiberaikan bangsa yang satu dari yang lainnya. Dalam literatur internasional biasanya dipakai dalam arti ini dan negara-negara yang baru merdeka tidak kebal terhadap penyakit itu.

Kedua, nasionalisme dapat juga menandakan sikap nasional yang positif yakni mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Inilah kebangsaan yang luas pandangannya serta dewasa dan adil. Nasionalisme ini antara lain sangat berguna untuk membina, rasa bersatu antara penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama, asal-usul), misalnya dalam negara eremigrasi seperti Australia, berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nasionalisme muncul pada akhir abad ke-18 dalam suasana liberalisme di antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Prancis yang pada waktu itu paling maju. Walaupun bangsa-bangsa lain suku-suku bangsa Jerman dan Italia khususnya merasa sama dalam hal budaya, namun mereka secara politis kurang berarti, karena terpecah-pecah. Maka rasa nasionalisme berkibar-kibar dan dikobar-kobarkan sampai negara bersatu dan kemerdekaan dicapai. Kemudian bangsa-bangsa Eropa Timur dan bangsa-bangsa Asia dan Afrika menyusul dan berjuang untuk menciptakan serta membangun suatu identitas nasional sebagai hal yang baru. Sebab warisan lama, kebudayaan suku yang sering kali sudah tanpa daya tidak memadai untuk membangun suatu negara nasional, bahkan kadangkala menghalanginya.

Dalam usaha menciptakan basis ideologis untuk perjuangan nasional tidak jarang perlu diperkembangkan bahasa nasional, diambil ide-ide dengan cara hidup yang baru dari bangsa-bangsa yang sudah membentuk paham nasional. Dalam praktiknya hal ini berarti dari negara barat yang kadang-kadang menjadi lawan utama para nasionalis, maka timbullah paham yang setengah baru dan setengah lama, tentang dirinya sebagai bangsa atau nation dalam hal ini Anderson (1992) mendefinisikan bahwa bangsa atau nation adalah suatu komunitas politik yang dibayangkan secara geografis terbatas namun berdaulat. Mengapa dibayangkan, karena memang diantara anggotanya tidak akan saling mengenal satu sama lain, tetapi pikiran tiap anggota itu, hidup dalam suatu bayangan mengenai keterkaitan diantara mereka. Kemudian juga dibayangkan terbatas, karena pasti ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain. Sebab tujuannya ialah mengadakan negara yang sudah kalah dengan negara yang sudah maju. Maka tidak



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

mengherankan, kalau banyak nasionalis abad ini merupakan tokoh-tokoh peralihan modern dan asli (native, tradisional) seperti misalnya Sun Yat Sen, Kemal Ataturk, Nehru, Soekarno atau Gamal Abdul Nasser.

Sesudah nasionalisme mencapai tujuan, yaitu negara bersatu, merdeka yang tidak perlu merasa terancam lagi, maka tidak jarang nasionalisme melemah, berubah bentuknya atau tinggal hal untuk hari-hari raya nasional saja yang penuh folkloris-tradisional. Seperti upacara-upacara bendera, peringatan-peringatan hari nasional termasuk Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

PATRIOTISME, NASIONALISME, DAN INTERNASIONALISME

Patriotisme adalah cinta terhadap tempat kelahiran, yang sudah menjadi pembawaan bagi tiap-tiap manusia, oleh karena itu tidak sama dengan nasionalisme, walaupun kedua pengertian itu saling dikaca-balaukan. Cina terhadap tanah tumpah darah itu sama dengan patriotisme, yang berasal dari baba a latin pater = ayah, patria tanah, bapa = tanah air (Romein, 195 6: 74).

Nasionalisme Indonesia menurut Suseno (1992:165) adalah daerah, masyarakat dan kebudayaan yang secara bersama merupakan Indonesiatidak merupakan sebuah kesatuan alami melainkan kesatuan etis, dasarnya bukan tendensi-tendensi bawah sadar masing-masing kelompok penduduk, melainkan sebuah kehendak yang secara sadar menegakkan diriberdasarkan kesatuan pengalaman. sejarah. Sejarah itu terutama merupakan sejarah pendetaan, perundasan dan poleh kekuatan kolonialisme. Kesatuan Indonesia tidak berdasarkan kesatuan budaya dan kesatuan etnis. Tidak ada keniscayaan bahwa seluruh wilayah yang dikuasai oleh Belanda menjadi bangsa dan negara.

Semaraknya perkembangan primordialisme serta sektarianisme tidak mustahil merupakan awal dari kehancuran dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Harus disadari bahwa nasionalisme atau wawasan kebangsaan itu bersifat kerakyatan, ini berarti bahwa nasionalisme itu memang benar-benar milik rakyat banyak. Nasionalisme memang berasal dari rakyat, yang akan dilakukan oleh rakyat dan selanjutnya akan diperuntukkan pada rakyat pula. Dengan demikian pemupukan dan pertumbuhan serta perkembangan nasionalisme selayaknya aembalilcan kepada masyarakat banyak, dan bukan monopoli segelintir elit intelektual misalnya, ataupun segelintir elit penguasa. Bila hal ini yang tedadi maka tidak mustahil bahwa kelompok elit intelektual maupun elit penguasa akan dengan susah payahmeyakinkan dan menyadarkan. rakyat betapa pentingnya nasionalisme dalam kehidupan dunia yang sudah mondial dewasa ini.

Wawasan Kebangsaan sebenarnya memangbukan hanya bersifat temporal dan spasial, melainkan meneratas menjulang melampaui ruang dan waktu dengan disemangati oleh roh kebangsaan. Dan kacamata spasial, memang wawasan kebangsaan hendaknya dan seharusnya dibayangkan terbatas di dalam suatu batas yang secara riil dibayangkan ada. Batas nation memang akan berhadapan secara langsung dengan globalisasi, yang menghendaki kontak dan hubungan antar negara antar benua yang tanpa batas (relativisme teritorial). Batas yang dibayangkan dan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

digambarkan ada hanyalah globe, yaitu globe atau bola bumi itu sendiri, selama masih dalam jangkauan globe ini maka hubungan menjadi tetap ada.

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KONTEKSNYA

Wawasan Kebangsaan pada satu sisi lokal berhadapan dengan munculnya tuntutan-tuntutan lokal yang pada titik tertentu manakala tidak terpenuhi dapat menjadi bumerang yang dapat juga menghancurkan keutuhan suatu negara bangsa. Iapada tatanan mikro wawasan kekuatan bukannya tanpa masalah. Pada sisi yang lain Wawasan Kebangsaan akan berhadapan dengan proses-proses internasionalisasi. atauglobalisasi, sebagaimana yang kini sedang berkembang menuju ke arah yang demikian. Oleh sebab itu masyarakat dunia tidak lebih sebagai suatu desa atau *The World as Village*. Harapan dan kenyataan yang mengarah kepadaperwujudan Bola Dunia yang menjadi desa kecil bukan suatu impian melainkan sudah menjadi realitas. Hal ini terbukti dengan derasnya arus komunikasi, berlangsungnya abad informasi dan sukses rayanya abad teknologi. Kajian atas Wawasan Kebangsaan dalam konteks ini akan memfokuskan kepada masalah (a) Ideologi; (b) Politik (c) Ekonomi; dan (d) Sosial budaya (1) Wawasan Kebangsaan dalam konteks Ideologi. Bagi warga negara seperti Indonesia yang telah mengikrarkan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya azas dan sebagai satu-satunya ideologi yang handal, maka sebenarnya wawasan kebangsaan tidak lebih sebagai pengejawantahan Pancasila **TERUTAMA PADA PASAL KETIGANYA** yaitu Persatuan Indonesia. Sebab memang dalam Wawasan Kebangsaan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia menjadi sesuatu yang taken for granted. Harus diakui bahwa kehandalan dan kemampuan Pancasila dalam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian Pendidikan Pancasila dalam satu segi, dengan Wawasan Kebangsaan dalam segi yang lain menjadi sekeping uang logam yang pada dasarnya juga. Oleh karena itu gerakan apapun yang mengancam keudm dan kesatuan Indonesia, baik dalam arti kesatm wilayah geografis perlu dipadamkan. Apapun latar belakang gerakan baik berdalih etnis, ras, suku maupun aganm perlu dipecahkan dengan satu tujuan untuk mempertahankan Indonesia dalam kesatuan ideologis. (2) Wawasan Kebangsaan dalam konteks Politik. Bagaimana sebenarnya interelasi antara Wawasan Kebangsaan dengan penyusunan keputusan-keputusan politik, hasilnya dapat diamati dan ditimbang seberapa jauh keputusan-keputusan politik itu menguntungkan rakyat banyak. Sebab pada dasarnya Wawasan Kebangsaan adalah Wawasan Rakyat Semesta. Di sini yang perlu dibongkar adalah adanya hubungan-hubungan yang bersifat kapitalistik diubah menjadi hubungan demokratik. Dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia, sudah selayaknya kelompok elit politik bukan hanya mewakili dan memperjalkan aspirasi dari masyarakat banyak utamanya adalah kelompok masyarakat yang tergolong papa. (3) Wawasan Kebangsaan dalam konteks Ekonomi. Di bidang perekonomian negara, manakala banyak sektor perekonomian telah diserahkan kepada pihak swasta, maka hal ini



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kelas dominasi swasta yang lebih besar, sehingga negara kebangsaan tidak lagi mampu memberikan perannya yang optimal. Pada awal-awal kemerdekaan tentunya peran negara kebangsaan adalah mengubah ekonomi kolonial atau juga yang bersifat kapitalisme menjadi ekonomi imal yang bercorak rakyat (Hardjana, 1991). Keputusan tentang perdagangan bebas seperti yang disepakati dalam APEC yang akan berlangsung pada tahun 2020, jelas menunjukkan gagalnya Wawasan Kebangsaan di dalam sektor perekonomian. Hal ini jelas merupakan bagi Wawasan Kebangsaan yang tercermin dalam konstelasi perekonomian negara. (4) Wawasan Kebangsaan dalam konteks Sosial Budaya. Pendidikan yang hanya berfungsi untuk menjinakkan anak didik tentu bertentangan dengan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu pendidikan yang mampu membebaskan terdidik dari berbagai belenggu baik yang pernah ada saat kolonialisme, maupun dalam periode kapitalisme hendaklah benar-benar diperhitungkan.

Nampak dalam kehidupan generasi muda kita yang notabene putra putri elit kekuasaan yang cenderung hedonisme merupakan tantangan besar bagi Wawasan Kebangsaan di bidang Sosial Budaya.

PENGAKTUALISASIAN NASIONALISME DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI DALAM PIPS

Pengaktualisasian Wawasan Kebangsaan di dalam PIPS sebagai upaya untuk mendesain tentang; seberapa jauh Wawasan Kebangsaan dapat diimplementasikan ke dalam Kurikulum, PIPS. Di dalam desain tersebut akan dikembangkan dan dikaji mengenai tujuan, sasaran, materi, strategi dan metode yang sebaiknya dipilih. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya hakikat esensial wawasan kebangsaan memang tidak harus dalam bentuk perubahan kurikulum, melainkan perlunya melakukan komunikasi, konsolidasi guna menemukan strategi yang kurang lebih tepat guna. Wawasan Kebangsaan tidak dapat hanya dirancang di pulau Jawa, melainkan harus melibatkan seluruh kawasan geografis yang secara representatif baik dari Wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur, misalnya berbagai pulau baik besar maupun kecil. Pendek kata akan melibatkan sebagian warga negara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Betapa kecil dan sederhananya sumbangan dari daerah-daerah, namun manfaatnya cukup penting. Walaupun harapan semacam ini akan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya, yang tinggi, namun melalui berbagai tahapan dan liputan yang lebih representatif akan membawa dampak yang baik guna proses demokratisasi dalam dunia pendidikan

Sebagaimana diusulkan oleh Parangtopo (1994:262) sebelum merumuskan hal-hal yang konkret dari wawasan Kebangsaan, carilah perbendaharaan antropologi kebudayaan dari tiap-tiap suku bangsa, yang menyangkut sekitar wawasan kebangsaan. Dengan mengingat berbagai macam pengalaman dalam merekonstruksi Kurikulum Pengajaran pada PIPS di masa lalu maka sudah selangkah untuk mendesain sedemikian rupa agar pengalaman sejarah yang pahit tidak



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

akan terulang lagi. Berangkat dari hal tersebut perlu diadakan berbagai macam upaya, apakah yang berkaitan dengan inventarisasi persoalan-persoalan, desain mengenai sasaran, formulasi mengenai tujuan, rancangan mengenai materi esensialnya, program pengajaran serta metode yang dianggap relevan.

Seberapa jauh Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan didalam PIPS. Seberapa jauh disiplin-disiplin keilmuan yang ada didalam jurusan-jurusan pada FPIPS telah mampu mengadopsi Pendidikan Wawasan Kebangsaan ke dalam kurikulum yang dilaksanakan.

Bagi Wawasan Kebangsaan dapat diformulasikan pengembangannya dalam PIPS sebenarnya bukanlah merupakan barang baru, melainkan sudah menjadi sesuatu yang telah digarap sejak dahulu. Barangkali yang lebih urgen adalah seberapa jauh Jurusan MDU (Mata Kuliah Dasar Umum) telah memikirkan hal ini. Hal ini ternyata hasil yang dicapai bukan hanya berhubungan dengan mahasiswa yang berada didalam lingkup IPS melainkan juga di luarnya yaitu fakultas-fakultas Non IPS, yang dalam satu Institut maupun Universitas.

Sudah saatnya untuk dipikirkan secara serius, bahkan berbagai upaya seperti: inventarisasi, identifikasi, penelitian, pengembangan dan tindak lanjut kearah suatu tindakan yang lebih bersifat programatik dan terpadu. Inventaris dalam pengertian mendata masalah-masalah yang menunjang maupun yang menjadi kendala tetap tegaknya suatu negara melalui Wawasan Kebangsaan itu sendiri. Berbagai macam permasalahan yang dapat ditemukan setelah melakukan inventarisasi, kemudian diidentifikasi sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penelitian misalnya.

Perlu diperhitungkan siapa-siapa sajakah yang dianggap strategis menjadi sasaran pendidikan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan. Menurut Mochtar Buchary sasaran yang paling mendesak dewasa ini adalah kelompok usia 30-35 yang sementara ini menduduki pimpinan baik dalam sektor pemerintah maupun swasta. Penggarapan sasaran yang demikian jelas membutuhkan reorientasi dari pihak elit kekuasaan, dan bukan sekedar pengambil kebijakan di tingkat fakultas atau institut. Sebab sasaran berada di luar jangkauan itu. Di samping itu juga materi-materi esensial yang dianggap representatif Buchary menyarankan agar Strategi Dasar Pendidikan wawasan Kebangsaan peserta mengenali (1) lingkungan fisik, (2) lingkungan sosio kultural dan (3) mengenali diri sendiri.

Materi yang perlu diajarkan dalam pendidikan wawasan kebangsaan adalah (1) sejarah nasional, (2) situasi nasional kontemporer, (3) situasi negara-negara lain, dan (4) berbagai proyeksi masa depan.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

PENUTUP

Melalui uraian yang singkat ini baiklah disimpulkan hal-hal sebagai :

1. Wawasan Kebangsaan memiliki arti yang penting, oleh karenanya urgensi dan relevansinya tidak perlu diragukan.
2. Wawasan kebangsaan yang pada dasarnya sama dengan nasionalisme mempunyai perbedaan yang mendasar, antara yang lahir dan dibesarkan di daratan Eropa dengan yang lahir di Asia dan juga di Afrika.
3. Wawasan kebangsaan mempunyai konteks yang sangat luas, baik ideologis, politis, ekonomi, dan sosial budaya. (4) Perlu dipikirkan untuk mengaktualisasikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di dalam wadah kurikulum? Tentang tujuan, sasaran, materi, strategi dan Metode dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan perlu direnungkan dan diformulasikan. Apakah dengan memikirkan wawasan kebangsaan memerlukan perubahan kurikulum dalam lembaga-lembaga pendidikan formal masih harus dikaji ulang dan diteliti urgensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. 1994. *Tantangan Globalisasi di Bidang Ekonomi*. Makalah disajikan dalam Ceramah FKA GMNI Malang, 7 Juli 1994.
- Abdulgani, R. 1994. “Pergeseran Nilai-nilai Kejuangan dan Kepahlawanan Dalam Perspektif Sejarah”. Makalah disajikan dalam Seminar Memperingati Hari Pahlawan ke 49, 10 Nopember 1945-10 Nopember 1994. Oleh MSI Cabang Propinsi Jawa Timur.
- Abdulgani, R. 1994. Wawasan Kebangsaan Menghadapi PJPT II. Makalah disajikan dalam Ceramah FK4 GMNI Malang, 4 Desember 1994.
- Constantino, R. 1991. *Alternatif Nasionalis*, terjemahan YPMJ. Jember: Yayasan Pengabdian Masyarakat Jember.
- Hardja, A. 1991. Nasionalisme Ekonomi di negara berkembang. *BASIS*, XL. (2) Yogyakarta: Yayasan B.P. Basis.
- Haryono. 2011. “Kedaulatan Indonesia Dalam Perjalanan sejarah Politik” dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Depdikbud Universitas Negeri Malang.
- Poespowardjojo, S. dan Parera, F.M. 1994. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta. Gramedia
- Kahin, G.M. 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta. Gramedia
- Kartodirdjo, S. 1994. *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Kesuma, Andi Ima. 2016. Pengembangan Pembelajaran IPS Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 1, p. 41-50
- Masdar, M ,H Halim, R Zainuddin. 2016. Implementasi Nilai Karakter Sebagai Bagian Revolusi Mental Dalam Pembelajaran Pendidikan IPS. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial 1 (1), 218-225.
- Mustadjar, M. 2016. Peran Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Menyambut MEA. Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial 1 (1), 168-174.
- Lane, M. 2014. *Unfinished Nation*. Yogyakarta: Penerbit Jaman baru
- Sukamto. 2015. *Mengkurat, Menggugat dan Merajut Sejarah Sosial*. Malang: UM Press.
- Sukamto. 2016. “Mengembalikan dan menjadikan Pancasila sebagai Jatidiri bangsa melalui rekayasa sosial dan pendidikan multikultural” Disajikan dalam Seminar Nasional HISPISI di Universitas Jakarta.
- Sukamto.2016. “ Konstruksi Sosial atas Kearifan Lokal Dalam Teori dan Praksis Pembelajaran sejarah” disampaikan dalam Seminar Nasional di PIPS, FISUniversitas Negeri Malang pada tanggal 13 Oktober 2016.